

CURRICULUM VITAE

Drs. SETYANTA NUGRAHA, M.M. QGIA., CGCAE

INSPEKTUR UTAMA

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

NIP : 19620719 198803 1 001

Eselon Ia, Pembina Utama, Gol IVE

Kelahiran - Klaten, 19 Juli 1962

Alamat

Jl Palembang IX Nomor 18 RT 007/RW 03 Palembang semi
Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 10270

Telepon : 021 5715 760

Hp : 081511261200

Email : setyanta@dpr.go.id, setyanta@yahoo.com,
nugrahasetyanta@gmail.com



Riwayat Jabatan

2015 - sekarang	Inspektur Utama
2014 - 2015	Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
2010 - 2014	Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
2007 - 2010	Kepala Biro Perencanaan & Pengawasan
2007	Kepala Bagian Perencanaan
2006 - 2007	Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana
2000 - 2006	Kepala Bagian Set Panitia Anggaran
1999 - 2000	Penugasan sebagai Kepala Bagian Set Panitia Anggaran
1997 - 1999	Kepala Sub Bagian Komisi VIII
1994 - 1997	Kepala Sub Bagian Komisi APBN

Pendidikan Formal

2003	S2 Manajemen Keuangan Universitas Satya Gama Jakarta
1986	S1 Manajemen Perusahaan UII Yogyakarta

Diklat Substansi

2020	Diklat Sertifikasi Qualified Government Internal Auditor (QGIA)
2019	Bimtek Membangun UKPBJ sebagai Pusat Unggulan - PPPI, Yogyakarta
2018	Pelatihan Character Building & Team work ITTAMA, PT KIS Jaya Manajemen, Bandung
2018	Uji Kompetensi Teknis Pendeteksi Kecurangan Pengadaan, LSPKP, Bogor
2018	Best Practices in Internal Auditing, IIA Indonesia, Surabaya
2017	Outward Bound PPSA XXI - Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya, Rindam, Sukabumi
2016	ECIIA Conference GRC Stockholm- European Confederation Institute of Internal Auditor, Stockholm Swedia
2016	The Art Of Internal Auditor : The Future Of Auditing in A Changing Landscape- IIA Indonesia, Bali
2016	Seminar Nasional "Utilisasi Diskresi untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik LAN RI, Jakarta
2016	Internal Audit: The Most Necessary Profession To Enhance and Protect Organizational Value, YPIA, Bali
2016	Inter-Parliamentary Study Program - Clerk of the Senate & Clerk of The House of Representatives, Canberra, Australia
2015	Diskusi Kelompok terfokus LPIKP : Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi oleh KPK- LPIKP, Jakarta
2014	Workshop on Furthering Participation in National Budgeting-Opportunities for Southeast Asia - Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS, Singapura
2014	Training on Budget Analysis and Oversight for Relevant Staff of DPR Support System - ProRep USAID, Jakarta
2013	Prinsip dan Teknik Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI- PPAK STAN-ProRep USAID, Bandung
2012	Strengthening Budget Analysis Capacity in the Legislature – HDP Washington DC, Amerika
2011	Pelatihan Model Makro Ekonomi APBN Angkatan II LPEM UI, Jakarta
2011	Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - L2 Lulus, Bappenas, Jakarta
2008	Legislative Budget & Personal Systems Workshop for Indonesia's DPR – USAID Washington DC, Amerika
2007	Responsible Parliamentary Governance Course (RPG) Centre for Democratic Institution (CDI) - ANU Canberra, Australia
2006	Diklat Manajemen Pengawasan Internal – Sinergi Solusi Prima Jakarta
2005	Pelatihan Dasar -dasar Ekonomi Makro, GIAT-USAID, Jakarta
2000	Workshop Capacity Building, Sespanas TMKP LAN, Jakarta
2000	Penataran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - KemenPAN, Jakarta
2000	Diklat Evaluasi dan Analisa Anggaran - LPEM UI, Jakarta
1995	Pendidikan Kader Koperasi II (TK. Lanjutan) PKP-RI, Jakarta
1989	Diklat Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan BPHN, Jakarta

Pengalaman Organisasi

2009 - 2015	Ketua Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR RI
2007	Wakil Sekretaris Unit Pelayanan Zakat (UPZ) MPR, DPR, DPD
2002 - 2006	Ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR RI
1998 - 2002	Bendahara Koperasi Pegawai Setjen DPR RI

Keanggotaan Organisasi Profesi

2021 - 2024	Komite Audit IIA Indonesia
2021 - 2024	Dewan Pengawas Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia
2021 - 2023	Ketua Dewan Pembina Asosiasi Profesi Certified Mitigation Procurement
2017 - sekarang	Volunteer Professional Auditor Forum (PAF)
2016 - sekarang	Anggota The Institute Internal Auditor
2015 - sekarang	Anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Setyanta Nugraha
2. Jabatan : INSPEKTUR UTAMA
3. NHK : 98389

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.488.323.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/64 m² di KOTA BATU ,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 330 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m²/177 m² di TANGERANG,
HASIL SENDIRI Rp. 886.073.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/70 m² di TANGERANG,
HASIL SENDIRI Rp. 877.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAXX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAXX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
5. MOBIL, MAZDA CX 5 MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 514.155.192

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.392.478.192
III. HUTANG	Rp.	32.225.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.360.253.192

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.